Inequality, Economic Growth, and Redistribution; Literature Review

Muhammad Hidayat^{1*)}, Syafruddin Karimi²

¹ Doctoral Student in Economics, Faculty of Economics, Andalas University, Indonesia
Department of Economics, Faculty of Economics, Andalas University, Indonesia

^{*)} email: m.hidayat@umri.ac.id

Article Info

Article history:

Received: Januari 2020

Accepted: April 2020

Published: Juni 2020

Keywords:

Economic Growth;

Inequality;

Redistribution;

Infrastructure;

JEL Classification:

Abstract

Economists have long believed that economic growth will solve the problem of inequality and poverty. For decades, the question of whether and how inequality affects growth has been the subject of open debate in the academic world. In the same section, the redistribution which is considered part of the equalization step also has positive and negative impacts on economic growth. This paper presents a literature review consisting of several sections including: 1) literature review on the relationship between inequality and growth; 2) the relationship between redistribution and growth; 3) even distribution of infrastructure is part of the form of redistribution.

Para ekonom telah lama percaya bahwa pertumbuhan ekonomi akan dapat menyelesaikan masalah ketimpangan dan kemiskinan. Selama beberapa dekade, pertanyaan apakah dan bagaimana ketimpangan mempengaruhi pertumbuhan telah menjadi bahan perdebatan terbuka di dunia akademis. Pada bagian yang sama redistribusi yang dianggap sebagai bagian dari langkah pemerataan juga memiliki dampak positif dan negatif terhadap pertumbuhan ekonomi. Paper ini menyajikan kajian literatur yang terdiri dari beberapa bagian diantaranya: 1) review literatur keterkaitan ketimpangan dan pertumbuhan; 2) keterkaitan redistribusi dengan pertumbuhan; 3) pemerataan infrastruktur bagian dari bentuk *redistribution*.

Pendahuluan

Selama beberapa dekade, pertanyaan apakah dan bagaimana ketimpangan mempengaruhi pertumbuhan telah menjadi bahan perdebatan terbuka di dunia akademis. Baik literatur teoritis dan empiris tidak dapat disimpulkan, apakah efek ketimpangan pada pertumbuhan sebagian besar positif atau negatif. Pada bagian yang sama redistribusi yang dianggap sebagai bagian dari langkah pemerataan juga memiliki dampak positif dan negatif terhadap pertumbuhan ekonomi. Hal ini menuntut pemerintah untuk serius dalam mengambil langkah untuk pemerataan pembangunan terkhusus keadilan sosial.

Paper ini menyajikan kajian literatur yang terdiri dari beberapa bagian diantaranya: 1) review literatur keterkaitan ketimpangan dan pertumbuhan; 2) keterkaitan redistribusi dengan pertumbuhan; 3) pemerataan infrastruktur.

Inequality and Growth

Para ekonom telah lama percaya bahwa pertumbuhan ekonomi akan dapat menyelesaikan masalah ketimpangan dan kemiskinan. Literatur awal berasal dari Kuznets (1955) berasumsi bahwa pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan pada akhirnya akan mengarah ke tingkat ketimpangan pendapatan yang lebih rendah (hipotesis kuznet). Konsep serupa mengenai korelasi antara ketimpangan dan pertumbuhan ekonomi telah lama mendominasi lembaga keuangan internasional, termasuk Bank Dunia dan Dana Moneter Internasional.

Dalam artikel Kaldor (1957) memberikan gagasan bahwa ketimpangan pendapatan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dikarenakan golongan kaya (pemodal) memiliki kecenderungan menabung yang lebih tinggi. Khususnya, ketika mengasumsikan *imperfect capital markets*, ini dapat diperlukan untuk meningkatkan investasi dan dengan demikian peningkatan pertumbuhan ekonomi. Selanjutnya, Barro (2000) menambahkan dengan kemungkinan setidaknya beberapa orang untuk mengakumulasi modal minimum yang diperlukan sebagai start-up bisnis dan mendapatkan pendidikan yang baik.

Pada awal 1990-an, penelitian yang menentang hipotesis kuznet mulai berkembang, sebagian didorong oleh kajian lintas negara yang mendukung hubungan negatif antara ketimpangan dan pertumbuhan. Galor & Zeira (1993) menekankan interaksi kredit modal bersifat *imperfections* dan *fixed cost* pada investasi pendidikan, menunjukkan bahwa ketimpangan yang terjadi dapat menyebabkan kurangnya investasi dalam sumber daya manusia dan akan mengurangi pertumbuhan.

Persson & Tabellini (1994) menyatakan bahwa dalam masyarakat di mana konflik distribusi penting, keputusan politik menghasilkan kebijakan ekonomi yang mengenakan pajak investasi dan kegiatan yang mendorong pertumbuhan untuk mendistribusikan kembali pendapatan. Hasil empiris dengan penggunaan data panel historis dan cross sections pasca perang menunjukkan hubungan negatif yang signifikan antara ketimpangan dan pertumbuhan. Hubungan ini hanya ada di negara demokrasi.

Alesina & Rodrik (1994) menetapkan beberapa hasil mengenai faktor kepemilikan individu median dan tingkat perpajakan, redistribusi, dan pertumbuhan. Kebijakan yang memaksimalkan pertumbuhan hanya optimal untuk pemerintah yang hanya peduli pada "kapitalis" murni. Semakin besar ketimpangan kekayaan dan pendapatan, semakin tinggi tingkat perpajakan, dan pertumbuhan yang lebih rendah. Hasil empiris menunjukkan bahwa ketimpangan dalam kepemilikan tanah dan pendapatan berkorelasi negatif dengan pertumbuhan ekonomi berikutnya. Alesina & Perotti (1996) memperkuat ide umum ini untuk kasus pengaturan non-demokratis, menunjukkan bahwa peningkatan ketimpangan mendorong ketidakstabilan politik, yang kemudian mendorong biaya sosial yang lebih tinggi yang pada gilirannya mengurangi pertumbuhan.

Li & Zou (1998) menunjukkan bahwa ketimpangan pendapatan secara teoritis dapat menyebabkan pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi jika konsumsi publik memasuki fungsi

utilitas. Secara empiris, estimasi baseline dan analisis sensitivitas menunjukkan bahwa ketimpangan pendapatan adalah positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Temuan ini sangat kontras dengan hubungan negatif antara ketimpangan dan pertumbuhan yang dikemukakan oleh Alesina & Rodrik dan oleh Persson dan Tabellini.

Frank (2009) memperkenalkan penggunaan panel komprehensif tingkat negara yang mencakup periode pasca perang 1945-2004. Bagi banyak negara, bagian pendapatan yang dipegang oleh desil teratas mengalami periode stabilitas yang berkepanjangan setelah Perang Dunia II, diikuti oleh peningkatan substansial dalam ketidaksetaraan selama 1980-an dan 1990-an. Lebih lanjut, kajian menyajikan pemeriksaan hubungan jangka panjang antara ketimpangan pendapatan dan pertumbuhan ekonomi. Hasil empiris menunjukkan bahwa hubungan jangka panjang antara ketimpangan dan pertumbuhan bersifat positif dan terutama didorong oleh konsentrasi pendapatan dalam *upper-end* distribusi pendapatan.

Shin (2012) melakukan riset untuk menguji secara teoritis hubungan ketimpangan-pertumbuhan dengan model pertumbuhan optimal stokastik yang menghasilkan: (1) bahwa keduanya mungkin - yaitu, ketimpangan yang lebih tinggi dapat menghambat pertumbuhan pada tahap awal pembangunan ekonomi, dan dapat mendorong pertumbuhan dalam kondisi yang hampir stabil; (2) bahwa redistribusi pendapatan dengan pajak penghasilan tinggi tidak selalu mengurangi ketimpangan pendapatan. Ketidaksetaraan pendapatan dapat dikurangi dengan pajak penghasilan yang lebih tinggi dalam kondisi hampir stabil, tetapi tidak dapat dikurangi pada tahap awal pembangunan ekonomi.

Penelitian dari Binatli (2012) dengan *model comparative* periode waktu tahun 1970-1985 dan 1985-1999. Hubungan yang signifikan secara statistik antara ketimpangan dan pertumbuhan di kedua periode waktu tidak terjadi. Namun, ada indikasi bahwa efek ketimpangan pada pertumbuhan mungkin berbeda di tahun 90an apabila dibandingkan dengan tahun 70an. Selanjutnya, menghasilkan efek negatif dari ketimpangan pendapatan terhadap pertumbuhan di tahun 70an tetapi tidak signifikan, dan efek positif secara konsisten di tahun 90an.

Halter, Oechslin, & Zweimüller (2014) memperkenalkan model teoritis sederhana untuk mempelajari bagaimana perubahan dalam ketimpangan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi dalam rentang waktu yang berbeda dan menelusuri secara empiris hubungan ketimpangan-pertumbuhan, dengan demikian mengandalkan spesifikasi yang berasal dari teori. Temuan empiris sejalan dengan prediksi teoritis: Ketimpangan yang lebih tinggi membantu kinerja ekonomi dalam jangka pendek tetapi mengurangi tingkat pertumbuhan PDB per kapita lebih jauh di masa depan. Efek jangka panjang dari ketimpangan yang tinggi cenderung negatif.

Selanjutnya, Boikova & Dachs (2018) mengeksplorasi dampak ketimpangan pendapatan, kemiskinan, dan kekayaan pada tingkat pertumbuhan ekonomi di Eurozone. Menemukan bahwa pengaruh ketimpangan pendapatan terhadap pertumbuhan ekonomi secara statistik tidak signifikan, sedangkan kemiskinan dan tabungan memiliki pengaruh negatif, signifikan secara statistik terhadap pertumbuhan, sedangkan efek aset keuangan positif, dan signifikan secara statistik. Hasil lain menunjukkan bahwa dinamika hubungan antara ketimpangan dan pertumbuhan lintas negara tidak berbentuk kurva U terbalik untuk semua pengamatan dan nilai rata-rata per negara di Eurozone.

Berg, Ostry, Tsangarides, & Yakhshilikov (2018) menyelidiki hubungan antara ketimpangan, redistribusi, dan pertumbuhan menggunakan dataset yang baru-baru ini dikompilasi yang membedakan dengan jelas antara *market inequality* (sebelum pajak dan transfer) dan *net inequality* (pasca pajak dan transfer), dan memungkinkan menghitung transfer redistributif untuk sejumlah besar negara maju dan berkembang. Di berbagai metode estimasi, sampel data, dan pemeriksaan ketahanan, menghasilkan: (1) *net inequality* yang lebih rendah berkorelasi kuat dengan pertumbuhan yang lebih cepat dan lebih tahan lama, mengendalikan tingkat redistribusi; (2) redistribusi nampak stabil dalam hal dampaknya

terhadap pertumbuhan, kecuali jika luas; dan (3) ketimpangan tampaknya mempengaruhi pertumbuhan melalui akumulasi modal manusia dan fertilitas.

Ketimpangan pendapatan level menengah keatas yang dibiarkan terus terjadi dalam jangka panjang akan mengganggu kestabilan negara dan bisa menghasilkan tindakan teroris pada daerah yang merasakan tidak terjadi pemerataan. Hal ini didukung oleh hasil dari berbagai riset diantaranya, Piazza (2011) menemukan bahwa ketimpangan pendapatan yang tinggi berhubungan dengan tindakan terorisme domestik. Selanjutnya hasil dari Enders, Hoover, & Sandler (2016) menemukan bahwa ketimpangan pendapatan mengarah pada lebih banyak terorisme domestik dan transnasional yang terjadi sebelum 1993 (ketika terorisme sayap kiri melimpah) tetapi tidak untuk periode pasca 1993.

Burgoon (2006) berpendapat bahwa kebijakan kesejahteraan sosial dapat mengurangi terorisme internasional dan domestik. Kebijakan sosial kemungkinan mempengaruhi terorisme dalam cara-cara yang tidak ditentukan, tetapi pada keseimbangan, harus mengurangi preferensi untuk terorisme dengan mengurangi *insecure* ekonomi, ketimpangan, kemiskinan, dan ekstremisme agama-politik. Dengan demikian, negara-negara dengan ketentuan kesejahteraan yang lebih dermawan harus mengalami serangan teroris lebih sedikit dan memiliki lebih sedikit warga negara mereka melakukan terorisme. Mendukung argumen ini, estimasi cross-sectional mengungkapkan bahwa upaya kesejahteraan suatu negara berkorelasi negatif dengan insiden teroris trans-nasional, serta terorisme transnasional yang dilakukan oleh warga negaranya. Estimasi data panel mengungkapkan bahwa beberapa ukuran upaya kesejahteraan mengurangi insiden terorisme transnasional. Temuan semacam itu menunjukkan bahwa memperkuat kebijakan sosial di dalam dan luar negeri mungkin tidak hanya melayani tujuan redistributif atau pembangunan tetapi juga membantu memerangi kekerasan teroris.

Redistribution and Growth

Redistribusi dianggap seperti perlakuan mengambil uang dari orang kaya dan memberikannya kepada orang miskin. Namun disini yang lain, fenomena yang relatif kecil jika membandingkan redistribusi dengan transfer lain yang dilakukan pemerintah, bukan kepada orang miskin tetapi dengan orang-orang yang terorganisir secara politis. Bantuan kepada golongan miskin tentu saja merupakan salah satu tujuan pemerintah dan ini bagian dari redistribusi.

Redistribusi merupakan fungsi terpenting dari sebagian besar pemerintah. Lebih jauh ini adalah fungsi pemerintah bahwa motif asli untuk membentuk pemerintahan adalah keinginan untuk redistribusi (Tullock, 1997).

Pembatasan preferensi yang diberlakukan oleh Persson dan Tabellini (1994) menyiratkan preferensi tunggal, sehingga ekuilibrium pajak atas modal adalah yang disukai oleh orang dengan median endowment. Tarif pajak benar-benar positif selama distribusinya condong positif. Alih-alih mengurangi pasokan tenaga kerja, pajak ini mengurangi akumulasi modal yang pada gilirannya mengurangi tingkat pertumbuhan (karena efek menguntungkan dari modal pada periode upah rata-rata berikutnya). Oleh karena itu kesimpulannya: ketimpangan memicu redistribusi yang intensif, yang menghambat pertumbuhan.

Pendapatan pajak membiayai infrastruktur publik yang meningkatkan upah, Sebaliknya jika kebijakan yang dipilih adalah yang disukai oleh mereka pemilik modal, bukan tenaga kerja, maka kebijakan tidak akan memaksimalkan pertumbuhan.

Transfer secara alami dianggap sebagai pajak negatif. Tetapi ini mungkin tidak pantas jika dianggap hanya sebagai pengembalian kepada individu dari kontribusi masa lalu mereka. Penggajian dan pajak lainnya dianggap sebagai hak pembelian untuk manfaat di masa depan (pensiun, perawatan kesehatan, pendidikan) bukanlah pajak dalam arti normal tidak dibalas oleh pemerintah. Pembayaran ke dalam skema asuransi sosial yang adil (aktuarial) dengan

demikian dapat dikecualikan dari analisis redistribusi. Pelaksanaannya menghadapi dua kesulitan. **Pertama**, menilai keadilan; skema semacam itu adalah masalah yang sulit. **Kedua**, tidak jelas bagaimana untuk melanjutkan jika kontributor menganggap hak manfaat dari kontribusi mereka menjadi lebih besar dari itu (Boadway & Keen, 2000).

Analisis yang dilakukan oleh Boadway & Pestieau (2011) dengan menggunakan fungsi utilitas quasilinear adalah yang paling sederhana yang memenuhi asumsi *Deaton* dan membuat perbedaan mencolok antara barang kebutuhan dan barang mewah. Dalam pengaturan ini dan asumsi tenaga kerja bervariasi di sepanjang margin, jika pajak progresif linier yang optimal diterapkan dan kendala non-negatif tidak mengikat, perlakuan istimewa pajak komoditas tidak boleh diberikan pada barang dengan elastisitas permintaan yang rendah. Redistribusi optimal dapat dicapai hanya melalui pajak penghasilan. Namun, jika progresifitas pajak penghasilan kurang optimal, misalnya, untuk memitigasi penghindaran pajak atau karena kendala politik, kesejahteraan sosial dapat ditingkatkan dengan membedakan struktur pajak komoditas dalam mendukung kebutuhan barang. Di sisi lain, jika batasan non-negatif pada barang mewah mengikat orang berupah rendah, pajak diferensial untuk keperluan meningkatkan kesejahteraan sosial jika pajak penghasilan yang optimal berlaku.

Pemerataan Infrastruktur Bagian dari *Redistribution*

Studi lintas daerah tentang infrastruktur publik menunjukkan bahwa infrastruktur tidak produktif secara ekonomi. Namun ada kemungkinan bahwa modal publik mempengaruhi aktivitas ekonomi sebagian besar dengan menggeser aktivitas itu dari satu lokasi ke lokasi lain. Jika demikian, infrastruktur dapat menjadi produktif pada skala geografis yang kecil tetapi tidak produktif di wilayah yang luas. Penelitian Boarnet (1995) menguji hipotesis tersebut dengan kajian fungsi produksi jalan raya dan modal infrastruktur jalan di negara bagian California untuk tahun 1969 hingga 1988. Hasilnya menunjukkan bahwa output daerah berhubungan positif dengan modal infrastruktur jalan raya di daerah, tetapi secara negatif dengan modal infrastruktur jalan raya di daerah tetangga. Ini menunjukkan bahwa efek produktif dari modal infrastruktur jalan sebagian besar merupakan pergeseran dalam kegiatan ekonomi dari satu daerah ke daerah lain (Boarnet, 1995).

Investasi dalam infrastruktur transportasi telah banyak digunakan oleh para pengambil keputusan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, terutama selama periode krisis ekonomi. Telah ada penelitian ekstensif tentang keterkaitan antara infrastruktur transportasi dan kinerja ekonomi sejak akhir 1980-an, yang ditandai dengan banyak bukti.

Melo, Graham, & Brage-Ardao (2013) melakukan meta-analisis bukti empiris pada output elastisitas infrastruktur transportasi, berdasarkan sampel dari 563 perkiraan yang diperoleh dari 33 studi. Meta analisis sebelumnya telah berfokus pada total modal publik dan karenanya tidak dapat secara tepat menjelaskan variasi luas dalam efek produktivitas dari infrastruktur transportasi atau memberikan panduan kepada pembuat kebijakan tentang pengembalian investasi dalam berbagai jenis infrastruktur transportasi. Hasil sekarang menunjukkan bahwa perkiraan yang ada dari efek produktivitas infrastruktur transportasi dapat bervariasi di seluruh kelompok industri utama, cenderung lebih tinggi untuk ekonomi AS daripada untuk negara-negara Eropa, dan lebih tinggi untuk jalan (*roads*) dibandingkan dengan moda transportasi lainnya. Variasi dalam perkiraan dari output elastisitas transportasi juga dijelaskan oleh perbedaan dalam metode dan data yang digunakan dalam penelitian sebelumnya. Kegagalan untuk mengontrol heterogenitas yang tidak terobservasi dan hubungan palsu cenderung menghasilkan nilai yang lebih tinggi, sementara gagal mengontrol urbanisasi dan tingkat kemacetan menyebabkan bias variabel yang dihilangkan. Temuan ini dapat digunakan untuk menginformasikan penelitian di masa depan tentang pilihan spesifikasi model dan estimasi serta pembuatan kebijakan terkait transportasi.

Teori dan bukti yang tersedia mengarah pada hubungan antara aksesibilitas fasilitas infrastruktur dan peningkatan kondisi di mana orang yang kurang mampu tinggal, tidak terasa bahwa peningkatan dalam distribusi pendapatan akan mengikuti. Misalnya, dapat diklaim bahwa infrastruktur dapat melengkapi modal fisik dan manusia sehingga dapat menghasilkan pengembalian yang lebih tinggi di daerah yang lebih kaya, yang relatif berlimpah di modal swasta, yang dengan demikian dapat mengakibatkan peningkatan ketimpangan pendapatan. Namun, para pembuat kebijakan sepertinya telah menerima begitu saja keberadaan hubungan positif antara pembangunan infrastruktur dan distribusi pendapatan, terlepas dari kenyataan bahwa, validitas empiris dari hubungan semacam itu belum diteliti secara seksama.

Dalam tulisan Calderon & Chong (2004) menunjukkan bahwa ada hubungan negatif dan signifikan antara kuantitas infrastruktur dan distribusi pendapatan dan antara kualitas infrastruktur dan distribusi pendapatan. Artinya, pembangunan infrastruktur dikaitkan dengan peningkatan distribusi pendapatan. Hasil dasar ini dipertahankan ketika menggunakan pendekatan lintas negara atau pendekatan data panel. Selain itu, dalam kasus terakhir, hasil ini kuat untuk penerapan teknik ekonometrik yang berbeda yang berurusan dengan masalah korelasi serial, efek spesifik negara, dan potensi masalah kausalitas terbalik. Selain itu, kami menunjukkan bahwa hasilnya sangat kuat untuk metode agregasi infrastruktur yang digunakan, baik itu ukuran komponen utama, indeks KKZ, atau indeks kuartil Hulten. Mengingat fakta bahwa sebagian besar tindakan individu sangat berkorelasi, penggunaan metode agregasi adalah pendekatan yang masuk akal. Namun, juga menguji langkah-langkah individu dan meskipun tidak kuat, temuan keseluruhan menggunakan langkah-langkah ini konsisten dengan hasil agregat. Akhirnya, Hubungan kuantitatif cenderung lebih kuat di negara-negara berkembang daripada hubungan kualitatif. Temuan ini berlaku ketika menggunakan metode ekonometrik yang berbeda dan sebagian besar tindakan infrastruktur.

Selanjutnya, Seneviratne & Sun (2013), Infrastruktur yang memadai telah lama dipandang sebagai faktor penting dalam pembangunan ekonomi. Berdasarkan regresi yang mencakup 76 ekonomi pasar maju dan berkembang, memperkirakan dampak infrastruktur dan investasi pada distribusi pendapatan. Hasil penelitian menemukan bahwa infrastruktur yang lebih baik, baik kualitas dan kuantitas, mempromosikan kesetaraan pendapatan, sementara hubungan antara investasi dan distribusi pendapatan lemah.

Pendekatan konvensional untuk desentralisasi fiskal menunjukkan bahwa desentralisasi menurunkan kekuatan redistribusi, tetapi teori baru-baru ini berpendapat bahwa desentralisasi fiskal dapat berfungsi sebagai alat komitmen. Efek yang pertama diperdebatkan untuk menyebabkan peningkatan ketimpangan antar-daerah, sementara yang terakhir menunjukkan penurunan. Selanjutnya menjelaskan hubungan antara desentralisasi fiskal dan ketimpangan antar-daerah dengan menggunakan data cross-sectional untuk Amerika Serikat. Hasil menunjukkan bahwa pencapaian otonomi oleh desentralisasi fiskal di daerah miskin (berpenghasilan rendah) berkontribusi terhadap penurunan ketimpangan antar daerah, tetapi bahwa efek ini tidak sebesar pengaruh buruk yang mendominasi desentralisasi fiskal terhadap daerah kaya (Akai & Hosio, 2009).

Hasil dari Hidayat et al (2018) menyatakan bahwa desentralisasi fiskal yang diwakili oleh belanja infrastruktur memiliki pengaruh negatif terhadap ketimpangan pembangunan yang terjadi di wilayah Provinsi Riau, pemerataan infrastruktur fisik di daerah ini mendorong perekonomian daerah yang terpencil dan akhirnya dapat mengurangi ketimpangan yang terjadi, adapun bentuk pemerataan infrastruktur yang terjadi berupa peningkatan akses jalan, meningkatkan rasio elektrifikasi atau berupaya agar semua orang mendapatkan fasilitas listrik. Penelitian lebih lanjut yang dilakukan oleh Hidayat, Darwin, & Hadi, (2020) menyatakan bahwa pembangunan infrastruktur listrik yang berkelanjutan dapat mengurangi ketimpangan ekonomi yang terjadi.

B. Li et al., (2017) mengukur pemerataan layanan publik dan standar hidup penduduk di Cina, berdasarkan data panel provinsi untuk periode 2001-2013, untuk menganalisis dampak pemerataan layanan publik terhadap kesenjangan regional Cina. Hasil empiris, berdasarkan model ekonometrik spasial, menunjukkan bahwa pemerataan layanan publik dapat mengurangi kesenjangan pendapatan dan konsumsi penduduk di Tiongkok. Promosi layanan publik yang beroperasi dapat meningkatkan pendapatan relatif dengan memperkuat infrastruktur dan mempromosikan pengembangan industri serta dapat merangsang tingkat konsumsi relatif dengan memperluas pasokan layanan. Promosi layanan publik "non-operasional" dapat meningkatkan pendapatan dan tingkat konsumsi dengan meningkatkan kemampuan kerja individu berpenghasilan rendah dan mengurangi biaya publik mereka. Ini juga menunjukkan bahwa menyamakan layanan publik adalah cara yang baik untuk mempromosikan standar hidup penduduk. Selain itu, hasil empiris menunjukkan bahwa pengeluaran keuangan publik pemerintah Cina, pembayaran transfer, dan intervensi dalam pembangunan ekonomi tidak dapat mengurangi kesenjangan regional. Model pertumbuhan ekonomi yang luas juga menyebabkan perluasan kesenjangan. Analisis koefisien Gini regional juga menunjukkan bahwa kesenjangan besar antara si kaya dan si miskin memiliki dampak negatif pada peningkatan konsumsi.

Mempromosikan pemerataan layanan publik adalah cara yang masuk akal dan efektif untuk mempersempit kesenjangan pendapatan dan konsumsi regional di Cina. Baik layanan publik "*operating*" dan "*non-operating*" dapat mempromosikan standar hidup penduduk. Dalam bayang-bayang penurunan pertumbuhan ekonomi dan penurunan ekspor, Pemerintah Cina harus mengambil kesempatan untuk mengalihkan fokusnya dari promosi pertumbuhan ekonomi ke peningkatan pasokan layanan publik dan pemerataan regional. Memperkuat infrastruktur di daerah yang kurang berkembang, meningkatkan pendidikan dan perawatan medis, dan meningkatkan kesejahteraan sosial adalah cara yang penting dan efektif untuk mempersempit kesenjangan dan meningkatkan standar hidup penduduk untuk memastikan stabilitas masyarakat Cina (B. Li et al., 2017).

Penelitian Mishra & Agarwal (2019) mengkaji hubungan antara pembangunan infrastruktur, urbanisasi, dan ketimpangan pendapatan desa-kota dalam perspektif Asia dengan menggunakan data panel dari sembilan negara Asia untuk periode spesifik 1991 hingga 2016. Hasil dari panel dinamik kuadrat terkecil menyatakan bahwa beberapa proksi pembangunan infrastruktur seperti tenaga listrik, transportasi dan telekomunikasi mengarah pada potensi pengurangan perbedaan pendapatan desa-kota, sementara di sisi lain, akses air dan sanitasi meningkat sama. Variabel kunci seperti urbanisasi dan inflasi menyebabkan ketimpangan di negara-negara tertentu. Hasil kausalitas dapat diperkirakan bahwa di dalam jangka pendek, urbanisasi menyebabkan ketimpangan desa-kota dan cara yang sama desa-kota juga menyebabkan urbanisasi di negara-negara yang dijadikan sampel. Selain itu, dapat juga disimpulkan bahwa tidak ada kausalitas yang ditemukan dari variabel laten pembangunan infrastruktur terhadap ketimpangan atau sebaliknya baik searah atau dua arah. Dalam hal implikasi kebijakan, hasil akhir menunjukkan bahwa inflasi dan urbanisasi menjadi faktor yang tepat yang menyebabkan ketimpangan pendapatan desa-kota. Oleh karena itu, jika ekonomi Asia secara tulus ingin mempertahankan pendapatan yang setara, para pembuat kebijakan harus memerangi inflasi dan mempertahankan keseimbangan yang sesuai dalam urbanisasi dan juga terkait dengan ketimpangan ekonomi. Pembuat kebijakan ekonomi makro benar-benar perlu mengembangkan upaya kolaboratif untuk mengurangi migrasi penduduk lokal dari daerah pedesaan ke daerah perkotaan. Ini biasanya dapat dilakukan dengan memberi mereka kesempatan kerja yang layak di tempat asalnya, dan oleh karena itu kebijakan pembangunan yang inklusif relevan dalam keadaan ekonomi ini.

Lessmann (2012) menganalisis dampak politik dan desentralisasi fiskal pada ketimpangan regional, menggunakan dataset yang mencakup lima puluh empat negara pada

berbagai tahap perkembangan ekonomi. Estimasi cross-section dan data panel menunjukkan bahwa desentralisasi mengurangi ketimpangan regional secara umum. Namun, estimasi menggunakan pendekatan interaksi-variabel menyiratkan bahwa pengaruhnya tergantung pada tingkat pembangunan ekonomi. Sementara negara-negara kaya mendapat manfaat dari desentralisasi karena mereka mencapai distribusi pendapatan regional yang lebih merata, desentralisasi dapat menyebabkan ketimpangan regional yang lebih tinggi pada negara berkembang. Hasilnya menunjukkan arah yang sama untuk langkah-langkah desentralisasi fiskal dan politik, menyiratkan bahwa otonomi baik dalam pengambilan keputusan dan otoritas fiskal sangat menentukan dalam konteks ini. Jadi, ketika mendorong desentralisasi di negara-negara berkembang seperti yang diusulkan oleh lembaga-lembaga pembangunan internasional, konsekuensi redistribusi negatif yang potensial harus diperhitungkan.

Dalam artikel Solé-Ollé (2013) memberikan pengetahuan tentang ekonomi politik dari sisi alokasi investasi antar-daerah di bidang infrastruktur, dengan upaya untuk menguraikan motif taktis dan terprogram, di mana politik taktis mengacu pada alokasi investasi diskresi untuk daerah dengan kriteria lebih 'pengaruh politik' dan politik terprogram mengacu pada alokasi investasi sesuai dengan kriteria 'objektif' tertentu (misalnya, tingkat pendapatan). Hasilnya menunjukkan bahwa politik taktis memang penting karena daerah yang paling banyak menerima dana adalah di mana: (1) margin suara petahana rendah; (2) beberapa suara diperlukan untuk memenangkan kursi tambahan di legislatif; (3) pemerintah pusat dan daerah dikendalikan oleh partai yang sama; dan (4) partai daerah memainkan peran penting dalam legislatif. Namun, hasil lain juga menunjukkan bahwa politik terprogram lebih penting, karena redistribusi antar-daerah terbukti meningkat: (a) dengan kedatangan demokrasi dan *European Unions Funds*; (b) di bawah pemerintahan kiri, dan (c) semakin lemah korelasi antara pengaruh politik dan pendapatan daerah.

SIMPULAN

Berdasarkan uraian diatas, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan yang diantaranya: 1) Ketimpangan tinggi dalam jangka waktu yang panjang akan mengganggu kestabilan Negara, dan dapat memicu tindakan separatis/terorisme daerah; 2) Perdebatan hubungan ketimpangan dengan pertumbuhan ekonomi yang memberikan hasil positif dan negatif dihasilkan dari dataset dan model yang digunakan, dengan ini mengindikasikan bahwa penanganan ketimpangan untuk masing-masing negara tidak bisa disamakan. Oleh karena itu, kajian terkait pembahasan ketimpangan dan pertumbuhan ekonomi dapat terus dikembangkan dengan penggunaan dataset yang baru dan model yang terus berkembang; 3) Redistribusi dijadikan sebagai solusi penanggulangan ketimpangan; salah satunya dengan pemerataan infrastruktur. Infrastruktur yang seimbang diantara daerah dapat menurunkan ketimpangan yang terjadi, oleh karena itu pemerintah dituntut harus selektif dalam pengalokasian dana desentralisasi fiskal, prioritas untuk daerah dengan tingkat ketimpangan yang tinggi; 4) Dalam jangka pendek redistribusi negatif terhadap pertumbuhan, dan sebaliknya untuk jangka panjang.

DAFTAR PUSTAKA

- Akai, N., & Hosio, M. (2009). Fiscal Decentralization, Commitment and Regional Inequality: Evidence from State-level Cross-sectional Data for the United States. *Journal of Income Distribution*, 18(1), 113–113. Retrieved from <https://jid.journals.yorku.ca/index.php/jid/article/view/22708>
- Alesina, A., & Perotti, R. (1996). Income distribution, political instability, and investment. *European Economic Review*, 40(6), 1203–1228. [https://doi.org/10.1016/0014-2921\(95\)00030-5](https://doi.org/10.1016/0014-2921(95)00030-5)
- Alesina, A., & Rodrik, D. (1994). Distributive Politics and Economic Growth. *The Quarterly*

- Journal of Economics*, 109(2), 465–490. <https://doi.org/10.2307/2118470>
- Barro, R. J. (2000). Inequality and Growth in a Panel of Countries. *Journal of Economic Growth*, 5(1), 5–32. <https://doi.org/10.1023/A:1009850119329>
- Berg, A., Ostry, J. D., Tsangarides, C. G., & Yakhshilikov, Y. (2018). Redistribution, inequality, and growth: new evidence. *Journal of Economic Growth*, 23(3), 259–305. <https://doi.org/10.1007/s10887-017-9150-2>
- Binatli, A. O. (2012). Growth and Income Inequality: A Comparative Analysis. *Economics Research International*, 2012, 1–7. <https://doi.org/10.1155/2012/569890>
- Boadway, R., & Keen, M. (2000). Redistribution. In *Handbook of Income Distribution* (Vol. 1, pp. 677–789). [https://doi.org/10.1016/S1574-0056\(00\)80015-9](https://doi.org/10.1016/S1574-0056(00)80015-9)
- Boadway, R., & Pestieau, P. (2011). *Indirect Taxes for Redistribution: Should Necessity Goods Be Favored?* (No. 3667). Retrieved from <https://ssrn.com/abstract=1971162>
- Boarnet, M. G. (1995). *Transportation Infrastructure, Economic Productivity, and Geographic Scale: Aggregate Growth versus Spatial Redistribution* (No. UCTC NO. 255). Retrieved from <https://escholarship.org/uc/item/6sj276z4>
- Boikova, T., & Dahs, A. (2018). Inequality and economic growth across countries of the Eurozone. *International Journal of Sustainable Economy*, 10(4), 315. <https://doi.org/10.1504/IJSE.2018.095254>
- Burgoon, B. (2006). On Welfare and Terror: Social Welfare Policies and Political-Economic Roots of Terrorism. *Journal of Conflict Resolution*, 50(2), 176–203. <https://doi.org/10.1177/0022002705284829>
- Calderon, C., & Chong, A. (2004). Volume and Quality of Infrastructure and the Distribution of Income: An Empirical Investigation. *Review of Income and Wealth*, 50(1), 87–106. <https://doi.org/10.1111/j.0034-6586.2004.00113.x>
- Enders, W., Hoover, G. A., & Sandler, T. (2016). The Changing Nonlinear Relationship between Income and Terrorism. *The Journal of Conflict Resolution*, 60(2), 195–225. <https://doi.org/10.1177/0022002714535252>
- Frank, M. W. (2009). Inequality and Growth In The United States: Evidence From A New State-Level Panel Of Income Inequality Measures. *Economic Inquiry*, 47(1), 55–68. <https://doi.org/10.1111/j.1465-7295.2008.00122.x>
- Galor, O., & Zeira, J. (1993). Income Distribution and Macroeconomics. *The Review of Economic Studies*, 60(1), 35. <https://doi.org/10.2307/2297811>
- Halter, D., Oechslin, M., & Zweimüller, J. (2014). Inequality and growth: the neglected time dimension. *Journal of Economic Growth*, 19(1), 81–104. <https://doi.org/10.1007/s10887-013-9099-8>
- Hidayat, M., Darwin, R., & Hadi, M. F. (2018). Inequality of Interregional Development in Riau Indonesia; Panel Data Regression Approach. *International Journal of Economics and Financial Issues*, 8(5), 184–189. Retrieved from <http://econjournals.com/index.php/ijefi/article/view/6919>
- Hidayat, M., Darwin, R., & Hadi, M. F. (2020). Does Energy Infrastructure Reduce Inequality Inter-Regional in Riau Province, Indonesia? *International Journal of Energy Economics and Policy*, 10(1), 160–164. <https://doi.org/10.32479/ijeeep.8658>
- Kaldor, N. (1957). A Model of Economic Growth. *The Economic Journal*, 67(268), 591. <https://doi.org/10.2307/2227704>
- Kuznets, S. (1955). Economic Growth and Income Inequality. *The American Economic Review*, 45(1), 1–28. <https://doi.org/10.2307/1811581>
- Lessmann, C. (2012). Regional Inequality and Decentralization: An Empirical Analysis. *Environment and Planning A: Economy and Space*, 44(6), 1363–1388. <https://doi.org/10.1068/a44267>
- Li, B., Li, T., Yu, M., & Chen, B. (2017). Can equalization of public services narrow the

- regional disparities in China? A spatial econometrics approach. *China Economic Review*, 44, 67–78. <https://doi.org/10.1016/j.chieco.2017.03.010>
- Li, H., & Zou, H. (1998). Income Inequality is not Harmful for Growth: Theory and Evidence. *Review of Development Economics*, 2(3), 318–334. <https://doi.org/10.1111/1467-9361.00045>
- Melo, P. C., Graham, D. J., & Brage-Ardao, R. (2013). The productivity of transport infrastructure investment: A meta-analysis of empirical evidence. *Regional Science and Urban Economics*, 43(5), 695–706. <https://doi.org/10.1016/J.REGSCIURBECO.2013.05.002>
- Mishra, A., & Agarwal, A. (2019). Do infrastructure development and urbanisation lead to rural-urban income inequality Evidence from some Asian countries. *International Journal of Sustainable Economy*, 11(2), 167. <https://doi.org/10.1504/IJSE.2019.099054>
- Persson, T., & Tabellini, G. (1994). Is Inequality Harmful for Growth? *The American Economic Review*, Vol. 84, pp. 600–621. <https://doi.org/10.2307/2118070>
- Piazza, J. A. (2011). Poverty, minority economic discrimination, and domestic terrorism. *Journal of Peace Research*, 48(3), 339–353. <https://doi.org/10.1177/0022343310397404>
- Seneviratne, D., & Sun, Y. (2013). *Infrastructure and Income Distribution in ASEAN-5 : What are the Links?* (No. 13/41). Retrieved from <https://www.imf.org/en/Publications/WP/Issues/2016/12/31/Infrastructure-and-Income-Distribution-in-ASEAN-5-What-are-the-Links-40316>
- Shin, I. (2012). Income inequality and economic growth. *Economic Modelling*, 29(5), 2049–2057. <https://doi.org/10.1016/j.econmod.2012.02.011>
- Solé-Ollé, A. (2013). Inter-regional redistribution through infrastructure investment: Tactical or programmatic? *Public Choice*, 156(1–2), 229–252. <https://doi.org/10.1007/s11127-011-9896-6>
- Tullock, G. (1997). Reasons for Redistribution. In *Economics of Income Redistribution* (2nd ed., pp. 1–16). https://doi.org/10.1007/978-94-011-5378-2_1